

**STRATEGI DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA DALAM
PELESTARIAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE DI KAPUK
MUARA JAKARTA UTARA**

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN (S.IP)**



Dosen Pembimbing :

AHMAD CHUMAEDY M.Si

Disusun oleh:

ANDYNI RAHMAWATI

NPM : 1965201070

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Dalam
Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara
Jakarta Utara

Diajukan Oleh : Andyni Rahmawati

NPM : 19-65-201-070

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Skripsi Disetujui

Tangerang, 9 Agustus 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dosen Pembimbing



Yusuf Fadli M. Soc.Sc

NBM: 138.737



Ahmad Chumaedy M.Si

NIDN: 0431128005

**LEMBAR PENGESAHAN
STRATEGI DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA DALAM
PELESTARIAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE DI KAPUK
MUARA JAKARTA UTARA**

Oleh :

Andyni Rahmawati

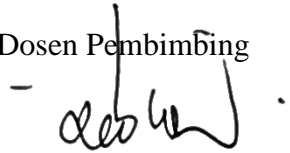
NIM : 1965201070

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah Diujikan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 9 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Ahmad Chumaedy M.Si

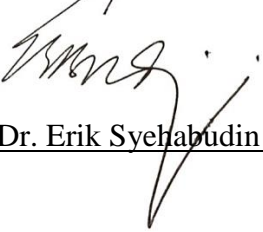
NIDN: 0431128005

Penguji Sidang 1



Tito Inneka M.AP

Penguji Sidang 2



Dr. Erik Syehabudin MM

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Yusuf Fadli M.Soc.Sc

NBM: 138.737

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Andyni Rahmawati

NPM : 1965201070

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 14 Desember 2001

Alamat : Jl. Kh. Kilin RT.05/RW.06 Kelurahan. Batu Jaya
Kecamatan. Batu Ceper Kota.Tangerang Banten

Dengan ini menyatakan bahwa :

A. Tugas Akhir yang berbentuk Skripsi yang berjudul :

STRATEGI DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA DALAM PELESTARIAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE DI KAPUK MUARA JAKARTA UTARA.

Adalah benar disusun/oleh saya sendiri dan jika kemudian hari diketahui berdasarkan bukti-bukti yang kuat ternyata skripsi tersebut dibuatkan orang lain atau diketahui bahwa skripsi tersebut merupakan plagiat/mencontek/menjiplak hasil karya orang lain, dengan ini saya siap menerima pembatalan/pencabutan Gelar Akademik dan siap mengulang kembali penyusunan Skripsi dari awal.

B. Bahwa seluruh dokumen (fotokopi ijazah, transkrip nilai) dan lain-lain sebagai pernyataan siding asli milik saya pribadi dan dapat saya pertanggungjawabkan keasliannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tangerang, 9 Agustus 2023

Pembuat Pernyataan

Andyni Rahmawati

ABSTRAK

Pengelolaan hutan mangrove merupakan salah satu hal yang penting untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove tersebut. Penelitian tentang Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara. Tujuan untuk: (1) Mengetahui Strategi yang bisa di terapkan untuk mengelola hutan mangrove secara optimal. (2) mengetahui situasi fokus penelitian tambahan yang berkaitan dengan strategi pemerintah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analilis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam mengelola dan melestarikan Ekowisata merupakan kegiatan pariwisata yang menaruh perhatian besar pada konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan salah satu tantangan utama kehidupan manusia dari sudut pandang ekonomi, sosial maupun politik. Berdasarkan data kunjungan tersebut dapat dilihat bahwa ekowisata mangrove Kapuk Muara tidak sesuai dengan karakteristik ekowisata, sedangkan, tujuan dari ekowisata sendiri adalah mengembangkan fungsi hutan mangrove dan melestarikan lingkungannya. Namun, perubahan Kawasan konservasi menjadi ekowisata ternyata menimbulkan penurunan kualitas lingkungan seperti contohnya kerusakan mangrove, kerusakan infrastruktur seperti jembatan yang tidak layak digunakan sebagai akses jalan pengunjung dapat mengganggu kenyamanan pengunjung , serta kurangnya tempat pembuangan sampah sehingga masih banyak sampah yang berserakan atau terlihat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pertlu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan ekowisata mangrove di kapuk muara. Pengembangan sarana prasarana obyek wisata mangrove kapuk muara selama ini masih terkendala dengan kurangnya anggaran yang dimiliki, sebab pengeluaran dana anggaran pada setiap tahunnya masih mengalami kenaikan dan penurunan. Diberlakukannya Perda Nomor 6 Tahun 2017 menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pengembangan obyek ekowisata mangrove kapuk muara jakarta utara yang nantinya akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya ketersediaan anggaran yang cukup maka pengelolaan ekowisata mangrove kapuk muara akan menjadi lebih optimal.

Kata kunci: Mangrove, pengelolaan,

ABSTRACT

Mangrove forest management is one of the important things to preserve the mangrove forest ecosystem. Research on the Strategy of the City Parks and Forest Service in Preserving Mangrove Forest Ecotourism in Kapuk Muara, North Jakarta. Objectives to: (1) Know the strategies that can be applied to optimally manage mangrove forests. (2) find out the situation of additional research focus related to government strategy. Data collection techniques through interviews, observation and documentation, while data analysis uses qualitative descriptive techniques. Based on the results of the study, the Strategy of the City Parks and Forest Service in managing and preserving Ecotourism is a tourism activity that pays great attention to the conservation of natural resources and the environment which is one of the main challenges of human life from an economic, social and political perspective. Based on the visiting data it can be seen that the Kapuk Muara mangrove ecotourism is not in accordance with the characteristics of ecotourism, meanwhile, the purpose of ecotourism itself is to restore the function of mangrove forests and preserve their environment. However, the change in the conservation area to ecotourism has resulted in a decrease in environmental quality such as for example damage to mangroves, damage to infrastructure such as bridges that are not suitable for use as access roads for visitors can disturb the comfort of visitors, as well as a lack of landfills so that there is still a lot of trash scattered or visible. The Provincial Government of DKI Jakarta needs to allocate a budget for the development of mangrove ecotourism in Kapuk Muara. The development of infrastructure for the Kapuk Muara mangrove tourism object has so far been constrained by a lack of budget, because spending on budget funds each year is still increasing and decreasing. The enactment of Regional Regulation Number 6 of 2017 has become a legal umbrella for the government to allocate a budget for the development of North Jakarta's Kapuk Muara mangrove ecotourism object which will later become one of the Regional Original Revenues (PAD). With the availability of sufficient budget, the management of the Kapuk Muara mangrove ecotourism will be more optimal.

Keyword: Mangroves, management,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT semesta alam. Segala puji dan syukurr penulis panjatkan khadiran Illahi yang terus menganugrahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan persembahan akhir dari perkuliahan yang telah penulis jalani dan sebagai persyarat meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (SIP). Pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muahmmad SAW yang selalu menjadi panutan dan menjadi pembimbing bagi setiap umatnya dan tidak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam proses penyusunan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat.

1. Bapak Dr. H. Ahmad Amrullah, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang.
2. Bapak Dr. H. Achmad Kosasih, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Bapak Yusuf Fadli, S.sc. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
4. Bapak Toddy Aditya, S.IP. M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

5. Bapak Achmad Chumaedy M.Si yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua atas kasih sayang, pengorbanan dan do'a tiada henti-hentinya kepada penulis, sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
7. Kepada saudara Aditya Pratama Hendra Putra S.IP yang telah menemani serta membantu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan penelitian ini.
8. Serta, Teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 yang saling memberikan dukungan dan masukan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa di dalam tulisan penulisan ini masih memiliki kekurangan dan kesalahan karna peneliti yakin bahwa di dunia ini tidak ada sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Ucapan terimakasih ini memang tidak dapat membalas semua dukungan yang penulis terima. Semoga Allah SWT Membalas semuanya menjadi pahala yang jauh lebih besar.

Tangerang, 9 Agustus 2023

Penulis

Andyni Rahmawati
1965201070

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.5.1 Manfaat bagi Penulis	7
1.5.2 Manfaat bagi Objek Penelitian.....	7
1.5.3 Manfaat Akademik.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Alqur'an dan Hadist.....	10
2.2 Peneliti Terdahulu.....	12
2.3 Landasan Teori.	15
2.3.1 Strategi.....	15

2.3.1.1 Definisi Strategi.....	15
2.3.1.2 Manajemen Strategi.....	16
2.3.2 Ekowisata.....	19
2.3.2.1 Definisi Ekowisata.....	19
2.3.2.2 Prinsip Ekowisata.....	20
2.3.3 Hutan Mangrove.....	21
2.3.3.1 Definisi Mangrove.....	21
2.3.3.2 Fungsi Hutan Mangrove.....	22
2.3.4 Kebijakan Pelestarian Lingkungan.....	23
2.3.4.1 Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup.....	23
2.4 Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Subjek, Waktu, dan Tempat Penelitian.....	26
3.1.1. Subjek Penelitian.....	26
3.1.2 Waktu Penelitian.....	26
3.1.3 Tempat Penelitian.....	27
3.2 Metode Penelitian.....	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data	28
3.3.1 Data Primer.....	29
3.3.2 Data Sekunder.....	31
3.4 Teknik Analisis Data.....	32
3.5 Teknik Keabsahan Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Kawasan Hutan Mangrove Kapuk Muara di Jakarta	
Utara.....	34
4.2 Tugas dan Fungsi.....	37
4.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta.....	37
4.2.2 Kedudukan Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta.....	39
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta.....	40
4.3 Dasar Hukum Pembentukan Kawasan Hutan Mangrove.....	41
4.4 Penyajian dan Analisis Data.....	43
4.4.1 Strategi Pemerintah Dalam Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove Kapuk Muara Jakarta Utara	44
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel Waktu Penelitian.....	27
Sumber data Informan.....	31
Nama-nama Sumber Data Informan.....	43
Strategi Edukatif Pada Objek Ekowisata Mangrove Jakarta Utara.....	49
Strategi Fasilitatif pada Ekowisata Mangrove Jakarta Utara.....	52
Fasilitas Ekowisata Mangrove Kapuk Muara.....	56
Karakteristik Anggaran Pengelolaan Ekowisata.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
PEDOMAN WAWANCARA.....	67
TRANSKIP WAWANCARA.....	69
LAMPIRAN SURAT-SURAT.....	72
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	76
INFRASTRUKTUR EKOWISATA MANGROVE KAPUK MUARA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekowisata Hutan Mangrove Kapuk Muara adalah salah satu tempat wisata yang memiliki potensi keindahan alam dan kekayaan budaya yang bernilai tinggi dalam pasar industri ekowisata, yang berkembang di Daerah Kawasan Tegal Alur-Angke Kapuk termasuk Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Ekowisata hutan mangrove kapuk muara seluas 44,76 ha dan hutan produksi Kapuk muara seluas 158,10 ha yang dikenal dengan jalur hijau Tol Sedyatmo. Juga terdapat fasilitas pengunjung diantaranya seperti Mushola, Toilet Umum, dan Pandopo/Saung tempat untuk beristirahat.

Berdasarkan data kunjungan tersebut dapat dilihat bahwa ekowisata mangrove Kapuk Muara tidak sesuai dengan karakteristik ekowisata, sedangkan, tujuan dari ekowisata sendiri adalah mengembaikan fungsi hutan mangrove dan melestarikan lingkungannya. Namun, perubahan Kawasan konservasi menjadi ekowisata ternyata menimbulkan penurunan kualitas lingkungan seperti contohnya kerusakan mangrove, kerusakan infrastruktur seperti jembatan yang tidak layak digunakan sebagai akses jalan pengunjung dapat mengganggu kenyamanan pengunjung, serta kurangnya tempat pembuangan sampah sehingga masih banyak sampah yang berserakan atau terlihat.

Penyebab dari berkurangnya jumlah mangrove salah satunya adalah aktifitas manusia yaitu tebang habis yang menyebabkan turun drastis, untuk mencegah penurunan kuantitas hutan mangrove dan meningkatnya pelestariannya diperlukan perubahan sikap dan persepsi diperlukan strategi yang baik dalam upaya pelestarian hutan mangrove (Syahroni 2020). Keberadaan hutan mangrove di Indonesia ini dari tahun ketahun mengalami penurunan, banyak orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap sumber daya alam, terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem mangrove yaitu seperti penebangan liar, perusakan hutan, dan eksploitasi alam atau pemanfaatan yang berlebihan, semua berdampak buruk bagi pertumbuhan mangrove (Sompah 2015).

Kerusakan hutan mangrove jelas berdampak buruk salah satunya yaitu terhadap lingkungan, hidup, sistem khususnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) yang mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dalam peningkatan kemampuan tersebut berlaku pada bidang kehutanan menjadi sangat penting diperhatikan dalam menangani berbagai persoalan pengelolaan hutan mangrove (Sompah 2015). Berdasarkan total luas mangrove Indonesia seluas 3.364.075 Ha, kondisi mangrove lebat seluas 3.121.239 Ha (93%), mangrove sedang seluas 188.363 Ha (5%), dan mangrove jarang seluas 54.474 Ha (2%). Adapun pemerintah dalam melakukan rehabilitas Kawasan mangrove dengan kondisi tutupan yang jarang (Perikanan 2021).

Pelestarian mempunyai arti proses yang memberikan pengawasan dari semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan proses

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain, hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat khususnya hutan mangrove yang perlu dijaga, dipertahankan, dan dilindungi agar hutan mangrove dapat berfungsi dengan baik (Hamdani 2020). Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di muara sungai, daerah pasang surut atau tepi laut. Adapun upaya yang dilakukan untuk melestarikan hutan mangrove yakni diperlukan pengelolaan hutan mangrove dari beberapa pihak baik dari masyarakat, pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Hamdani 2020).

Masalah ini terjadi karena semakin berkurangnya mangrove di pesisir pantai. Akar mangrove berperan sebagai penopang tanah yang tidak mampu menahan limpasan, sehingga habitat ekosistem pesisir terancam. Mangrove untuk wilayah pesisir memiliki fungsi yang sangat penting karena dapat mencegah air masuk ke daratan dan juga sebagai penahan erosi pantai. (Indriawati a/ac Retnowaty 2018)

Berdasarkan kunjungan di hutan mangrove tersebut terdapat sampah-sampah yg dapat di jumpai di Kawasan hutan mangrove, dan juga ada beberapa masalah bahwa lingkungan alam ini dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, khususnya pada hutan mangrove yang rusak karena ulah manusia itu sendiri dan Infrastruktur yang tidak terawat. Siti Nurbaya Bakar menyebut hutan mangrove seluas 600.000 hektare (Ha) telah rusak. Kerusakan tersebut terjadi lantaran alih fungsi Kawasan menjadi lahan pertanian, perkebunan, permukiman, dan insfrastruktur lain (Prasetyo 2021). Kerusakan sumber daya alam akibat buruknya pengelolaan sumber daya alam dapat menimbulkan berbagai konflik akibat pemanfaatannya yang tidak sah. Pengelolaan sumber daya alam tidak dapat

tercapai tanpa partisipasi masyarakat setempat, diperlukan peran sosial. Jika keadaan ekosistem mangrove tetap terjaga dan sumber dayanya digunakan sesuai dengan prinsip kelestarian, maka semua fungsi mangrove akan tetap berjalan. Pencemaran ini telah mempercepat kerusakan hutan mangrove di kawasan muara. Yang terlihat oleh kasat mata adalah munculnya sampah-sampah yang menjadi perhatian kita semua (Irwinsyah 2019). Namun baru 30 Hektare (Ha) yang sudah berhasil di lestarikan sebagai Kawasan wisata (Martini 2020).

Pemerintah mencoba untuk menyelamatkan lingkungan salah satunya perlindungan hutan mangrove dengan mengeluarkan Undang-undang strategi pengelolaan ekosistem mangrove (Pepres No.73 Tahun 2012). Upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mencapai tujuan terwujudnya pengelolaan ekosistem mangrove dan masyarakat sejahtera berdasarkan sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional (Sompah 2015). Kebijakan yang dilakukan yaitu kebijakan terhadap pengolahan hutan mangrove dan kebijakan terhadap pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat di lingkungan khususnya di Kapuk Muara Jakarta Utara. BRI Insurance (BRINS) melakukan program tanam 2.000 bibit mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara yang bertujuan untuk menjaga konversi alam dan bumi dari beragam resiko pemanasan global hingga pencemaran. Memitigasi Risiko bencana perubahan iklim melalui perluasan hutan mangrove untuk meningkatkan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan (Humaniora 2022).

Oleh karena itu, Pengelolaan ekowisata hutan mangrove muara Kapuk dalam pelestarian ekosistem belum dimaksimalkan karena kondisi saat ini masih kurang terjaga. Tidak layak atau rusak seperti jembatan di sekitar hutan bakau, mereka

sangat berbahaya bagi wisatawan dan pengunjung baru. Karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran pengelolanya akan perlindungan lingkungan. Dan terlihat kondisi di hutan mangrove ini tempat sampah disana pun kurang memadai, mengingat tidak sebanding dengan luasnya wilayah ekowisata dan banyaknya pengunjung yang datang. ini yang harus menjadi perhatian sebab kawasan hutan mangrove saat ini masih menjadi daya Tarik tersendiri bagi wisatawan di dalam Ibukota maupun di luar Ibukota.

Adapun Perbandingannya berbeda dengan Kawasan pesisir Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka , Kawasan tersebut mempunyai keunikan. yang cenderung Terjadi peningkatan luas daratan yang dikenal dengan akresi mengikuti vegetasi mangrove. Peningkatan luas daratan di Wilayah pesisir Desa Kota Uneng disebabkan oleh perubahan arus laut, sehingga sedimen dari daerah yang terkikis terbawa arus dan diendapkan di pesisir pantai desa Kota Uneng. Endapan lumpur ini diikat oleh akar mangrove kemudian mengeras membentuk lahan baru. Sedimen lebih mungkin terjadi di daerah ini karena akumulasi lumpur yang dibawa oleh massa air dari kegiatan erosi pantai di utara, yaitu Daerah Kota Uneng Kabupaten Sikka. (Apelabi 2019)

Sedangkan di Kawasan ekowisata mangrove Kapuk Muara kondisi saat ini masih mengalami beberapa tekanan sehingga dalam pengelolaannya kurang memperhatikan aspek kelestarian. Yang menyebabkan ekosistem mangrove dan degradasi di lingkungan pantai, dengan terjadinya pencemaran air sungai. Sehingga kerusakan ekosistem mangrove umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan fisik dan faktor sosial.

Tujuan ini adalah untuk mengetahui kondisi hutan mangrove dan untuk mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove khususnya terhadap Dinas Kehutanan pada umumnya. Maka penulis mengadakan penelitian ini dengan mengangkat judul “STRATEGI DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA DALAM PELESTARIAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE DI KAPUK MUARA JAKARTA UTARA”. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dampak rehabilitasi hutan mangrove dan strategi yang bisa diterapkan untuk mengelola ekosistem hutan mangrove yang baik.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Bagaimana Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam pelestarian kawasan ekowisata hutan mangrove?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat terbatasnya waktu dan kemampuan yang tersedia maka penulis membatasi masalah penelitian ini hanya tentang Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Dalam Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian dan paling penting dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

- 1.4.1 Untuk mengetahui Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang bisa diterapkan untuk mengelola hutan mangrove secara optimal.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis

Diharapkan dengan penelitian ini penulis bisa mengetahui Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Dalam Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove sehingga dapat menerapkan ilmu yang di dapatkan di dunia perkuliahan ke dunia nyata.

1.5.2 Manfaat Bagi Objek Penelitian

Diharapkan semoga peneliti bisa memberikan masukan yang bermanfaat dimana berguna untuk melestarikan hutan mangrove Ekowisata Mangrove Di Kapuk Muara Jakarta Utara

1.5.3 Manfaat Akademik

Manfaat Akademik yaitu penulis berusaha memberikan tambahan pengetahuan yang lebih terperinci yang berguna bagi dunia akademik, penulis berharap bisa berbagi ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam penelitian terhadap penulis lain yang berguna sebagai pendalaman teori.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemaparan yang runtun dan sistematika, maka penulisan ini akan di bagi 5 bab di mana setiap bab terdiri dari berbagai sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, yang menerapkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang diteliti dalam bentuk deduktif, dari lingkup yang paling umum sehingga menitik pada masalah yang paling khusus atau spesifik. Kemudian memuat rumusan masalah bagian ini berisi pokok permasalahan yang akan diteliti dan disajikan dalam bentuk kalimat tanya yang merupakan pertanyaan penelitian. Selanjutnya Bab I memuat focus penelitian untuk memperjelas masalah penelitian maka perlu dibatasi supaya penelitian dapat lebih spesifik.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi Landasan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, berisi teori-teori yang menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang diteliti. Kemudian bab ini terdapat kerangka pemikiran yang secara logis dan sistematis guna menjawab pertanyaan penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang deskripsi Subjek /Objek, Tempat dan Waktu Penelitian, penggunaan metode penelitian yang digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menjelaskan Teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti dan data skunder yang diperoleh dari pihak lain yang telah diolah, kemudian Teknik analisis data berperan dalam menjelaskan untuk membuat gambaran terhadap data-data yang terkumpul dan tersusun dengan cara

memberikan interpretasi terhadap data-data tersebut, dan Teknik keabsahan data yang bertujuan mengetahui uji kredibilitas dan meningkatkan ketekunan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai deskripsi objek penelitian penyajian data yang diperoleh dari penelitian, serta analisis data secara sistematis, terperinci dan kritis, berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran menggunakan Teknik analisis data.

BAB V: PENUTUP

Penutup ini yang menjadi bab terakhir, peneliti menarik kesimpulan berupa jawaban masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berdasarkan analisis dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar referensi atau literatur lainnya yang dipergunakan dalam penelitian.

LAMPIRAN

Menyajikan lampiran-lampiran yang dianggap perlu oleh peneliti yang berhubungan dengan data penelitian dan tersusun secara berurutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Al-Qur'an dan Hadist

Hutan merupakan sebuah Kawasan di muka bumi yang memiliki peranan keberlangsungan hidup manusia. Manusia memiliki kewajiban dalam menjaga dan melestarikan hutan sebagai salah satu sumber penghidupan.

Pandangan Al-Qur'an yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan:

Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam didalamnya terkandung ayat-ayat yang membahas lingkungan, seperti perintah untuk menjaga lingkungan, dan larangan untuk merusaknya.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum [30] ayat 41:

عَمِلُوا لَذَىٰ أَبْعَضَ لِيذِيْقَهُمْ لِنَاسٍ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا لُبَّخِرُوا لُبْرًا فِي نَفْسَادًا ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ

“ Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) “.

Demikian pula Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 42:

أَكْثَرُهُمْ كَانَ قَبْلًا مِنَ الَّذِينَ عَاقِبَهُ كَانَ كَيْفَ فَانظُرُوا الْأَرْضَ فِي سَيْرُوا قُلْ

مُشْرِكِينَ

“ Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”

2.2 Peneliti Terdahulu

Gambar II.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama, Asal Universitas, Tahun	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Strategi Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Mangrove di Desa Sebauk Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang. (Kevin, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020).	Untuk mengetahui dampak rehabilitasi hutan mangrove dan strategi yang bisa diterapkan untuk mengelola ekosistem hutan mangrove yang baik.	Metode Observas, wawancara dan studi dokumentasi	Mendapatkan Respon positif dari masyarakat dalam mengurangi tingkat abrasi pantai, menahan tiupan angin tetapi kurang mendapatkan respon positif dalam hal meningkatkan sumber pendapatan dan objek wisata.
2.	Identifikasi Kerusakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Perairan Teluk Laikang Kabupaten Takalar (Agustina, Universitas, Pohuwato, 2022).	Untuk mengetahui tingkat kerusakan ekosistem mangrove dan mengetahui strategi pengelolaan ekosistem mangrove di perairan teluk laikang kabupaten takalar.	Metode deskriptif eksploratif dengan Teknik survei lapangan dan analisis SWOT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. 2. Rehabilitasi ekosistem mangrove. 3. Pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkala dan evaluasi 4. Pemanfaatan ekosistem mangrove secara lestari. 5. Sosialisasi pengelolaan ekosistem mangrove.
3.	Strategi Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove (Achmd J.Ely, Program Studi Perikanan	Untuk Mengidentifikasi bentuk-bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh	Metode analisis data deskriptif	Hasil penelitian diperoleh lima bentuk pemanfaatan yang dilakukan pada Kawasan mangrove Negeri

	Tangkap Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku, 2021).	masyarakat di kawasan mangrove.	kualitatif.	Amahai yaitu penangkapan ikan, pengumpulan tripang, bameti, wisata(rekreasi),serta Penelitian.
4.	Upaya Pelestarian Hutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (Prawestya Tunggul Damayatanti, MA Al-Ikhlas Blora Jawa Tengah, 2011).	Untuk mengetahui pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perhutani di Desa Bodeh dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.	Metode penelitian kualitatif	peningkatan pelestarian hutan yang dilaksanakan perhutani dalam sistem PHBM yaitu dengan merangkul dan bermitra dengan masyarakat.
5.	Pelestarian Hutan Mangrove kabupaten Sambas Suatu Kajian Ekonomi Lingkungan. (Eva Dolorosa, Universitas Tanjung Pura, 2011).	Untuk melakukan penilaian ekonomi terhadap sumber daya ekosistem mangrove Kabupaten Sambas.	Metode Penelitian Kuantitatif	Perubahan kondisi baik terjadinya kenaikan nilai pada komponen biaya, maupun terjadinya penurunan, Pelestarian Hutan Mangrove di Kabupaten Sambas Layak dilaksanakan.

Penelitian Pertama yang berjudul Strategi Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Mangrove di Desa Sebauk Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang. (Kevin, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020). Penelitian ini berisikan tentang dampak dari kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilakukan di Desa Sebauk diantaranya mengurangi abrasi pantai, menahan tiupan angin, menambah sumber pendapatan dan menjadi objek wisata. Bertujuan untuk mengetahui strategi yang bisa diterapkan untuk mengelola hutan mangrove secara optimal.

Penelitian Kedua yang berjudul Identifikasi Kerusakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Perairan Teluk Laikang Kabupaten Takalar (Agustina, Universitas, Pohuwato, 2022). Yang berisikan tentang tingkat kerusakan

ekosistem hutan mangrove di Perairan Teluk Laikang Kabupaten Takalar pada stasiun I, masuk dalam kategori rusak (jarang) karena disebabkan oleh penebangan kayu mangrove sebagai kayu bakar, tempat mencari ikan dan budidaya rumput laut. Pada stasiun II dan III termasuk dalam kategori baik (padat) karena adanya LSM di Perairan Teluk Laikang Kabupaten Takalar yang melestarikan mangrove. bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakannya.

Penelitian ketiga yang berjudul Strategi Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove (Achmd J.Ely, Program Studi Perikanan Tangkap Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku, 2021). Yang bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Kawasan Mangrove. Berisikan tentang ekosistem mangrove pada kawasan ini memiliki nilai keanekaragaman yang sedang dengan kondisi tidak ada spesies yang mendominasi atau komunitas berada dalam kondisi stabil. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat lima bentuk pemanfaatan ekosistem mangrove di Negeri Amahai yaitu, Penangkapan ikan, Pengumpulan eripang, Bameti, Wisata (Rekreasi), dan Penelitian.

Penelitian keempat yang berjudul Upaya Pelestarian Hutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (Prawesty Tunngul Damayatanti, MA Al-Ikhlas Blora Jawa Tengah, 2011) berisikan tentang upaya peningkatan pelestarian hutan yang dilaksanakan perhutani dalam sistem PHBM yaitu dengan merangkul dan bermitra dengan masyarakat. Maka dari semua kegiatan yang dilakukan dalam kemitraan, maka kesadaran masyarakat yang tinggi untuk peran aktif dalam sistem PHMB menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas ekologi serta hubungan sosial yang lebih baik. Hal itulah yang menyebabkan

semangat berpartisipasi masyarakat Desa Bodeh dalam kemitraan melalui sistem PHBM ini tinggi, dan ini sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan yang digagas oleh Koentjaraningrat.

Penelitian kelima yang berjudul Pelestarian Hutan Mangrove kabupaten Sambas Suatu Kajian Ekonomi Lingkungan (Eva Dolorosa, Universitas Tanjung Pura, 2011). Yang bertujuan untuk melakukan penilaian ekonomi terhadap sumber daya ekosistem mangrove Kabupaten Sambas. Berisikan tentang Identifikasi mata pencaharian alternatif penduduk di kawasan hutan mangrove Kabupaten Sambas meliputi usaha tambak, usahatani sayuran, usaha kopra dan usaha arang granular.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Strategi

2.3.1.1 Definisi Strategi

Strategi secara umum mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar acuan dalam melakukan tindakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat (Brier a/ac lia dwi jayanti 2020).

Menurut Quinn (Brier a/ac lia dwi jayanti 2020) mengatakan bahwa strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan

utama, kebijakan kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh.

Pendapat diatas, dapat diartikan bahwa strategi sebagai suatu rencana yang digunakan oleh suatu pemimpin dan dijadikan sebagai alat dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, dalam strategi yang baik menuntut perencanaan.

2.3.1.2 Manajemen Strategi

Menurut Hunger dan Wheelen berpendapat bahwa pengamatan lingkungan menjadi tahapan tersendiri dalam manajemen strategi. Menurutnya, pengamatan lingkungan merupakan langkah yang harus dilakukan sebelum menyusun suatu strategi sehingga ini menjadi langkah tersendiri sebelum ke tahap perumusan strategi (Hunger dan Wheelen, 2003).

Diantaranya ada dua elemen dasar dalam manajemen strategi yaitu: (1) Pengamatan Lingkungan, (2) Dan Perumusan/Penerapan Strategi. Interaksi kedua tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Elemen-llemen dasar dari proses manajemen strategi menurut Hunger dan Wheelen terdapat dua elemen yaitu:

1) Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan meliputi lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi pemerintahan. Pengamatan lingkungan digunakan untuk menentukan faktor-faktor strategis, faktor strategis yaitu faktor yang paling penting untuk masa depan.

- a. Analisis Lingkungan, Lingkungan internal terdiri dari variabel (peluang dan ancaman) yang berbeda diluar organisasi. Variabel tersebut membentuk keadaan dalam organisasi dimana organisasi ini hidup. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial.
- b. Analisis internal adalah Lingkungan internal terdiri dari variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada didalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen. Variabel tersebut membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variabel ini meliputi struktur organisasi dan sumber daya organisasi.

2) Perumusan Strategi

Perumusan Strategi merupakan cara atau langkah-langkah menentukan strategi yang terbaik untuk mencapai sebuah tujuan.

a. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan dan sebaiknya diukur jika memungkinkan.

b. Strategi

Merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan komprehensif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.

Strategi tersebut juga mempunyai dua macam diantaranya:

1) Strategi Edukatif

Strategi edukatif dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Melalui pelatihan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kelompok sasaran terhadap suatu aspek tertentu. Kegiatan pelatihan yang telah dilakukan dalam peningkatan pemahaman.

2) Strategi Fasilitatif

Strategi fasilitatif dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan usaha yang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

3) Implementasi Strategi

Merupakan proses manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, dan anggaran.

- a. Program Merupakan pernyataan aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi organisasi, perubahan budaya internal atau awal dari suatu usaha penelitian baru.
- b. Anggaran Merupakan program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci merencanakan dan mengendalikan.

2.3.2 Ekowisata

2.3.2.1 Definisi Ekowisata

Seperti yang didefinisikan oleh Australian Department of Tourism (1999) Ekowisata adalah wisata berbasis pada alam dengan mengikuti aspek Pendidikan terhadap lingkungan alami dan kebudayaan masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Definisi ini memberi penegasan bahwa aspek yang terkait tidak hanya bentuk pariwisata lainnya, tetapi lebih dekat dengan pariwisata minat khusus dengan obyek dan daya Tarik wisata alam (Admin 2015).

Menurut (Sastrayuda 2010), Ekowisata merupakan kegiatan pariwisata yang menaruh perhatian besar pada konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan salah satu tantangan utama kehidupan manusia dari sudut pandang ekonomi, sosial maupun politik. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan mempengaruhi munculnya berbagai kebutuhan di semua departemen pembangunan. Tuntutan tersebut telah memicu pertumbuhan bisnis baru, pendekatan baru dalam berbagai kegiatan, baik yang dilakukan langsung oleh industri pariwisata, maupun upaya masyarakat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan.

Keadaan ini semakin meyakinkan bahwa lingkungan tidak lagi menjadi beban tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan upaya ekonomi. Oleh karena itu, diharapkan dapat memecahkan masalah, mendorong partisipasi dan mendorong semua elemen untuk bekerja sama mengatasi masalah lingkungan. Pemanfaatan dan pengembangan ekowisata sesuai dengan prinsip pengembangan ekowisata berkelanjutan, sebagaimana konsep dan pendekatan yang diakui secara

nasional dan internasional, merupakan bagian penting dari pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sastrayuda 2010).

Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009, ekowisata adalah kegiatan wisata alam di Daerah yang bertanggungjawab dan memperhatikan unsur pendidikan, dukungan usaha-usaha konservasi sumberdaya alam dan pemahaman serta peningkatan masyarakat lokal.

2.3.2.2 Prinsip Ekowisata

Menurut (Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin 2022) Prinsip-prinsip ekowisata yang telah dirumuskan Sebagian besar diambil dari prinsip-prinsip yang sudah ada pada TEIS (The International Ecotourism Standards), prinsip ini dalam kriteria antara lain:

- a. Ekowisata muncul sebagai bentuk respon terhadap masalah tidak bisa dimungkiri, tidak hanya lingkungan saja, tetapi juga sosial.
- b. Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisata lainnya.
- c. Menawarkan pengalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan Kerjasama dalam pemeliharaan atau konservasi.
- d. Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal.
- e. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan.

2.3.3 Hutan Mangrove

2.3.3.1 Definisi Mangrove

Mangrove berasal dari kata mangue (Portugis) dan grove (English). Mangrove adalah sejenis pohon, semak, atau pakis, secara umum mempunyai ukuran setinggi satu atau sampai satu setengah meter. Normalnya mangrove tumbuh diatas rata-rata muka air laut di zona pasang surut dan Kawasan muara (Made Yoga Putra 2015).

Bengen (2001) menjelaskan bahwa hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai tipe ekosistem hutan yang tumbuh di daerah batas pasang surut, tepatnya di daerah pantai dan sekitar muara sungai, tumbuhan tersebut tergenang disaat kondisi air pasang dan bebas dari genangan disaat kondisi air surut. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi mayoritas pesisir pantai di daerah tropis dan sub tropis yang didominasi oleh tumbuhan mangrove pada daerah pasang surut pantai berlumpur.(Ely et al. 2021)

Menurut (Rahmawaty 2006) Steenis (1978) berpendapat bahwa Mangrove itu adalah vegetasi hutan yang tumbuh antara garis pasang surut. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang secara alami oleh pasang surut air laut, tergenang pada saat pasang naik dan bebas dari genangan pada saat pasang rendah. Ekosistem mangrove adalah suatu sistem yang terdiri atas lingkungan biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu habitat mangrove.

Menurut Bengen, ada beberapa karakteristik mangrove yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Lahannya tergenang air laut, baik terus menerus ataupun saat pasang.
2. Mendapatkkan sumber tawar, baik dari sungai atau air tanah yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur.
3. Jenis tanah berlumpur atau berpasir dan banyak mengandung pecahan karang.
4. Air laut tidak terlalu deras.
5. Jenis tumbuhan yang tumbuh di Hutan Mangrove khusus karena tahan hidup dengan air asin.

2.3.3.2 Fungsi Hutan Mangrove

Mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang banyak, diantaranya meliputi fungsi fisik, biologi, fungsi ekonomi dan berbagai jenis fungsi lainnya. Mangrove juga merupakan tumbuhan yang produktif yaitu seperti kayu bakar, bahan bangunan, tempat pemijahan ikan dan pelindung pantai (Ariana 2016).

Menurut Anwar et al (1984) fungsi dan manfaat mangrove dibagi menjadi tiga

1. Secara fisik, dapat menjaga kestabilan garis pantai dan melindungi pantai dari tebing sungai.
2. Secara biologis, untuk tempat pemijahan dan pembesaran benih-benih tempat bersarang.
3. Secara ekonomi, untuk tambak, tempat pembuatan garam, rekreasi, dan produksi kayu-kayu.

2.3.4 Kebijakan Pelestarian Lingkungan

2.3.4.1 Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sedangkan makna dari daya dukung lingkungan hidup dapat dipahami sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, MakhluK lain dan keseimbangan diantara keduanya. Daya tampung lingkungan hidup merupakan daya kemampuan lingkungan hidup dalam menyerap zat, energi dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan.

Kebijakan publik memiliki pengertian sebagai alat untuk mencapai tujuan publik, dan bukan tujuan perorangan atau kelompok. meskipun sebagai alat keberadaan kebijakan publik amat penting. Penting karena keberadaanya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Kebijakan diartikan sebagai tindakan terarah yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Istilah kebijakan ini tertuju pada kebijakan publik yaitu kebijakan negara atau kebijakan yang dibuat oleh negara. Kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. (Ikhsan, Ardytia, a/ac Soetijono 2021)

Kebijakan pelestarian lingkungan hidup salah satunya melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang sering juga disebut sebagai UU Sumber Daya Air. Dalam Pasal 1 angka 14 UU Sumber Daya

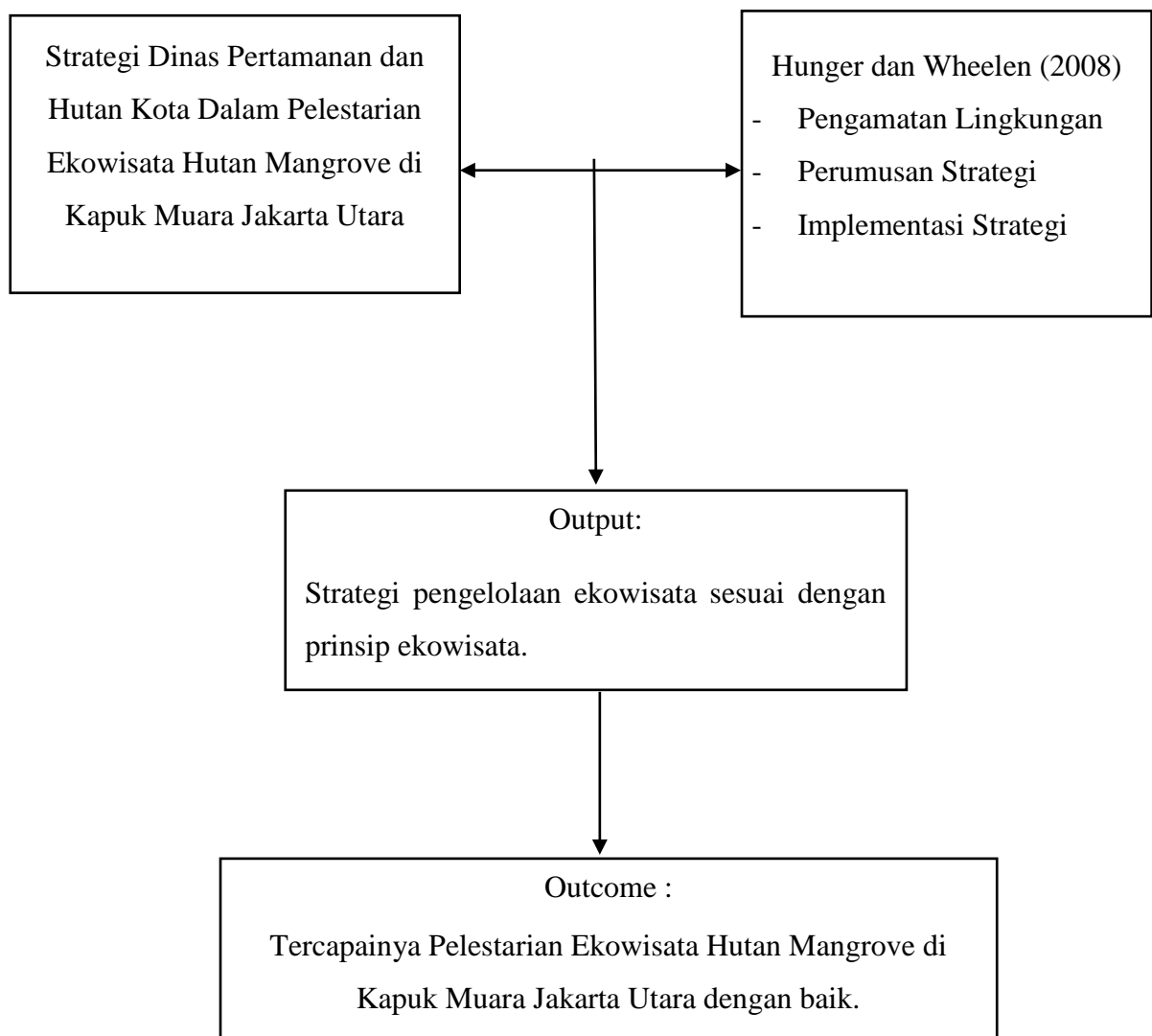
Air, konservasi sumber daya air dimaknai sebagai upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Pelaksanaan kebijakan terkait pelestarian lingkungan hidup melalui konservasi sumber mata air merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat secara luas. Ketergantungan makhluk hidup terhadap keberadaan air merupakan alasan paling pokok bahwa segala upaya wajib dilaksanakan mengingat keberadaan air sebagai sumber kehidupan masyarakat yang secara alamiah bersifat dinamis dan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. (Ikhsan, Ardytia, a/ac Soetijono 2021)

2.4 Kerangka Pemikiran

Judul yang oleh peneliti adalah “ Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Sebagai Bentuk Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove Di Kapuk Muara Jakarta Utara” dapat dipahami tujuan dari Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Sebagai Bentuk Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove Di Kapuk Muara Jakarta Utara adalah mengetahui dampak rehabilitasi hutan mangrove dan strategi yang bisa diterapkan untuk mengelola ekosistem hutan mangrove yang baik.

Kerangka berpikir yang telah diungkapkan oleh peneliti diatas merupakan suatu dasar untuk mengalami proses penelitian dalam bentuk sketsa pikir sebagai berikut.

Gambar II.2
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Subjek, Waktu, dan Tempat Penelitian

3.1.1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta subjek ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Dalam penentuan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive dalam penentuan informan yang peneliti gunakan. Hal ini dikarenakan peneliti memilih sumber data yang peneliti anggap sesuai dengan objek penelitian yang peneliti.

3.1.2 Waktu Penelitian

Rencana waktu penelitian dilakukan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Berdasarkan waktu penelitian yang telah peneliti sajikan pada Tabel 3.1 peneliti melakukan pengajuan judul pertama kali pada bulan November. Selama proses penyusunan penelitian ini peneliti tetap menjalankan diskusi dengan pembimbing peneliti, sebagai masukan untuk penelitian ini. Peneliti merencanakan sidang proposal pada bulan Maret. Setelah menjalankan sidang proposal peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data sejalan dengan itu peneliti melakukan pengolahan dan analisis data, agar penelitian ini dapat segera terselesaikan. Sampailah peneliti menyelesaikan

penelitian ini, dan merencanakan sidang akhir atau sidang skripsi pada awal bulan Agustus.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
		2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1.	Pengajuan Judul										
2.	Bimbingan										
3.	Sidang Proposal										
4.	Pengumpulan Data di Lapangan										
5.	Pengolahan dan Analisis Data										
6.	Sidang Skripsi										

Sumber : Data diolah Peneliti (2023)

3.1.3 Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di DKI Jakarta beralamat di Jalan K.S. Tubun No.1, RT 2/RW 5, Peramburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sebab peneliti ingin memberikan gambaran dan penjelasan secara faktual atau realitas dan mendetail terkait permasalahan yang peneliti angkat yaitu tentang Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Dalam Pelestarian ekowisata hutan mangrove di Kapuk Muara.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Aulia dkk., (2019) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari subjek dan objek penelitian yang diteliti. Hasil akhir yang peneliti dapatkan dari penelitian ini bukan hanya menghasilkan data namun juga memperoleh berbagai informasi yang bermakna.

Dengan menggunakan metode kualitatif, diyakini informasi yang diperoleh akan lebih lengkap top to bottom, dapat dipertahankan dan di signifikan untuk mencapai tujuan pemeriksaan ini. Terlebih lagi dapat menggambarkan kondisi dan kondisi dalam suatu organisasi, kantor atau mendirian negara dengan sarana dan siklus bermacam-macam informasi, pertemuan, persepsi dan pencatatan setiap kejadian di lapangan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data mengenai Strategi Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Dalam Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara di bahas peneliti menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, strategi pengumpulan informasi yang digunakan adalah dengan pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder yang mengidentifikasi dengan masalah Pengelolaan dan Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove ini. Sumber informasi yang akan digunakan antara lain :

3.3.1 Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah dalam penelitian. Wawancara merupakan pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu, dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik, dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini peneliti memimpin wawancara dengan pertemuan terkait, khususnya sumber terampil dan dianggap siap untuk memberikan gambaran dan data tentang eksplorasi yang ditunjuk oleh peneliti. (Iii 2020)

Wawancara ini dilakukan dengan elemen-elemen terkait Pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara :

- a. Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
- b. PJLP (Penanggung Jawab Lapangan) Bidang Kehutanan Ekowisata Hutan Mangrove Jakarta Utara.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai Pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode ini Peneliti gunakan untuk mengetahui suatu bentuk bimbingan. Dalam pemeriksaan ini, peneliti menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati langsung dari objek eksplorasi untuk mengumpulkan informasi dan menangani masalah yang dipertimbangkan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam bentuk Teknik dokumentasi juga perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif guna mendukung data yang diperoleh melalui beberapa teknik yang sudah disebutkan diatas. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto atau dokumen elektronik (Rekaman).

4. Informan Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam bentuk informan yang mana orang-orang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara dan memberikan informasi atau keterangan baik tentang suatu kejadian,. Karena dalam penelitian kualitatif peneliti harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka disebut informan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi fokus penelitian tambahan yang berkaitan dengan Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Dalam Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara. Adapun data informan meliputi :

Tabel III.2

Sumber data Informan

No.	Informan	Keterangan
1.	Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.	Tempat Penelitian
	a) Kepala Bidang Kehutanan. b) Seksi Konservasi Sumber Daya Hutan.	Informan

3.3.2 Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu berupa informasi penting yang juga telah disiapkan oleh kelompok lain, misalnya dalam bentuk tabel atau grafik. Peneliti dalam pengumpulan data sekunder melalui bahan-bahan yang disusun, baik sebagai metodologi, buku, pedoman, buku harian, gambar, laporan kerja dan dokumentasi, misalnya foto dan akun suara.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa Langkah yang ditempuh untuk mendapatkan menganalisis data yaitu antara lain:

- a. Pengumpulan Data, yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai bagaimana Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Dalam Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara untuk dibuat menjadi bahan dalam penelitian.
- b. Pengurangan Data, yaitu yang didapat dari penelitian tentang Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Dalam Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara setelah dipaparkan apa adanya, maka dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan kedalam pengabsahan.
- c. Penyajian Data, yaitu data yang didapat dari penelitian tentang Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Dalam Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
- d. Menarik Kumpulan Data Yang Diperoleh, yaitu setelah menjadi karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban di rumusan masalah.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Pengabsahan data, menjamin bahwa antara yang diamati dan yang diteliti telah sesuai dan benar-benar ada serta peristiwa tersebut memang benar-benar

terjadi begitu adanya. Data yang diperoleh haruslah valid, valid yang dimaksud yakni derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Jadi untuk memperoleh keabsahan data tersebut peneliti menggunakan teknik trigulasi yang mengecek kredibilitas data dengan sebagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kawasan Hutan Mangrove Kapuk Muara di Jakarta Utara

Ekosistem mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk sekurang-kurangnya disusun oleh 15 spesies mangrove, yang 9 spesies di antaranya merupakan jenis asli setempat dan sisanya merupakan spesies yang ditanam berasal dari kawasan lain. Jenis-jenis mangrove asli kawasan hutan lindung Angke Kapuk terbagi atas dua grup, yakni (1) mangrove sejati yang terdiri atas 7 spesies, dan (2) Asosiasi mangrove, yang terdiri dari 7 jenis, sedangkan pada hutan produksinya lebih bervariasi, Sebagian adalah jenis-jenis tanaman mangrove dari hasil rehabilitasi dan sebagainya adalah jenis-jenis selain mangrove.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkesinambungan giat melakukan pembinaan pada kawasan ruang terbuka kota yang antara lain berupa area hijau di ruang terbuka hijau hutan kawasan hutan mangrove kapuk. Pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keindahan ruang hijau kota yang pada akhirnya dapat mewujudkan citra DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang bersih dan tertata indah.

Kawasan Hutan Mangrove Kapuk adalah suatu bagian dari kawasan hutan mangrove (bakau) Tegal Alur-Angke Kapuk di pantai utara Jakarta yang termasuk wilayah Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Pada tahun 1977,

Menteri Pertanian dengan Keputusan Nomor 16/Um/6/1977 tanggal 10 Juni 1977 menetapkan kembali peruntukan kawasan hutan mangrove kapuk sebagai:

- a. Hutan lindung, 5 km sepanjang pantai dengan lebar 100 meter.
- b. Cagar alam uara angke.
- c. Hutan wisata.
- d. Kebun pembibitan kehutanan.
- e. Lapangan dengan tujuan istimewa (LDTI).

Pembangunan Kawasan Angke-Kapuk digagas oleh Pemerintah DKI Jakarta sesuai arahan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) DKI 1965-1985, bertujuan untuk mengembangkan areal tambak yang terbengkalai.

Menanggapi surat di atas, Direktur Jenderal Kehutanan dalam Suratnya No.2755/DJ/I/1981 tertanggal 27 Juli 1981 memberikan penjelasan tentang status pengelolaan Kawasan adalah sebagai berikut:

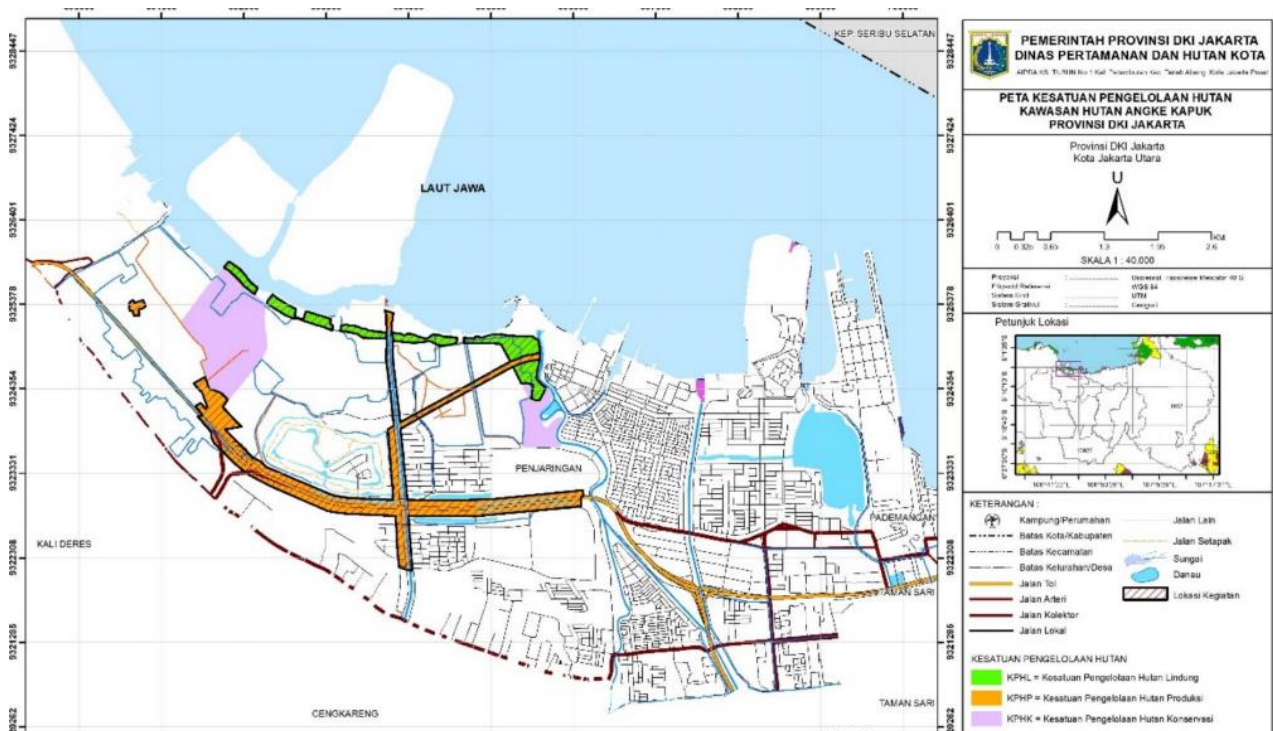
- 1) Wilayah Tanah Hutan Mangrove Kapuk seluas \pm 1.144 ha berada di bawah pengelolaan Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota DKI Jakarta untuk mengelola, memanfaatkan, dan membina Kawasan hutan seluas \pm 1.144 ha yang terletak di Kelirahan Kapuk Muara, dan Kamal Muara.
- 2) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 161/Kpts/Um/6/1977 tanggal 10 Juni 1977, ditetapkan Kembali fungsi Kawasan hutan Tegal Alur, Angke Kapuk, dan Cagar Alam Muara Angke, sebagai berikut:
 - a) Sebagai hutan lindung, 5 km sepanjang pantai dengan lebar 100 meter.
 - b) Sebagai cagar alam muara angke.
 - c) Sebagai hutan wisata.
 - d) Sebagai kebun pembibitan.

e) Sebagai lapangan dengan tujuan istimewa (LDTI).

Hasil pengukuran dan penataan batas ulang tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 097/Kpts-II/1988 tanggal 29 Februari 1988 yang menetapkan bahwa Kawasan hutan yang dipertahankan adalah seluas 335,50 ha terdiri atas:

No.	Nama Jenis	Luas
a.	Hutan Lindung	50,80 ha
b.	Cagar Alam Muara Angke	25,00 ha
c.	Hutan Wisata	101,60 ha
d.	Kebun Pembibitan Kehutanan	10,47 ha
e.	Cengkareng Drain	23,36 ha
f.	Jalur Transmisi PLN	25,90 ha
g.	Jalan Tol dan Jalun Hijau	91,37 ha

PETA SITUASI



Sungai cisadane yang terletak di bagian barat dan sungai citarum yang terletak di bagian timur. Keduanya mengendapkan bahan-bahan yang jauh lebih banyak daripada sungai-sungai yang mengalir di bagian tengah dataran itu sendiri, sehingga kecepatan perubahan garis pantai berkembang tidak selaras, dan Teluk Jakarta seolah-olah berbentuk busur hal inilah yang menyebabkan secara sistem lahan Kawasan Hutan Mangrove sebagian masuk dalam sub-region daratan pasang surut berlumpur.

4.2 Tugas dan Fungsi

4.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta

1. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pelayanan pertamanan dan pemakaman

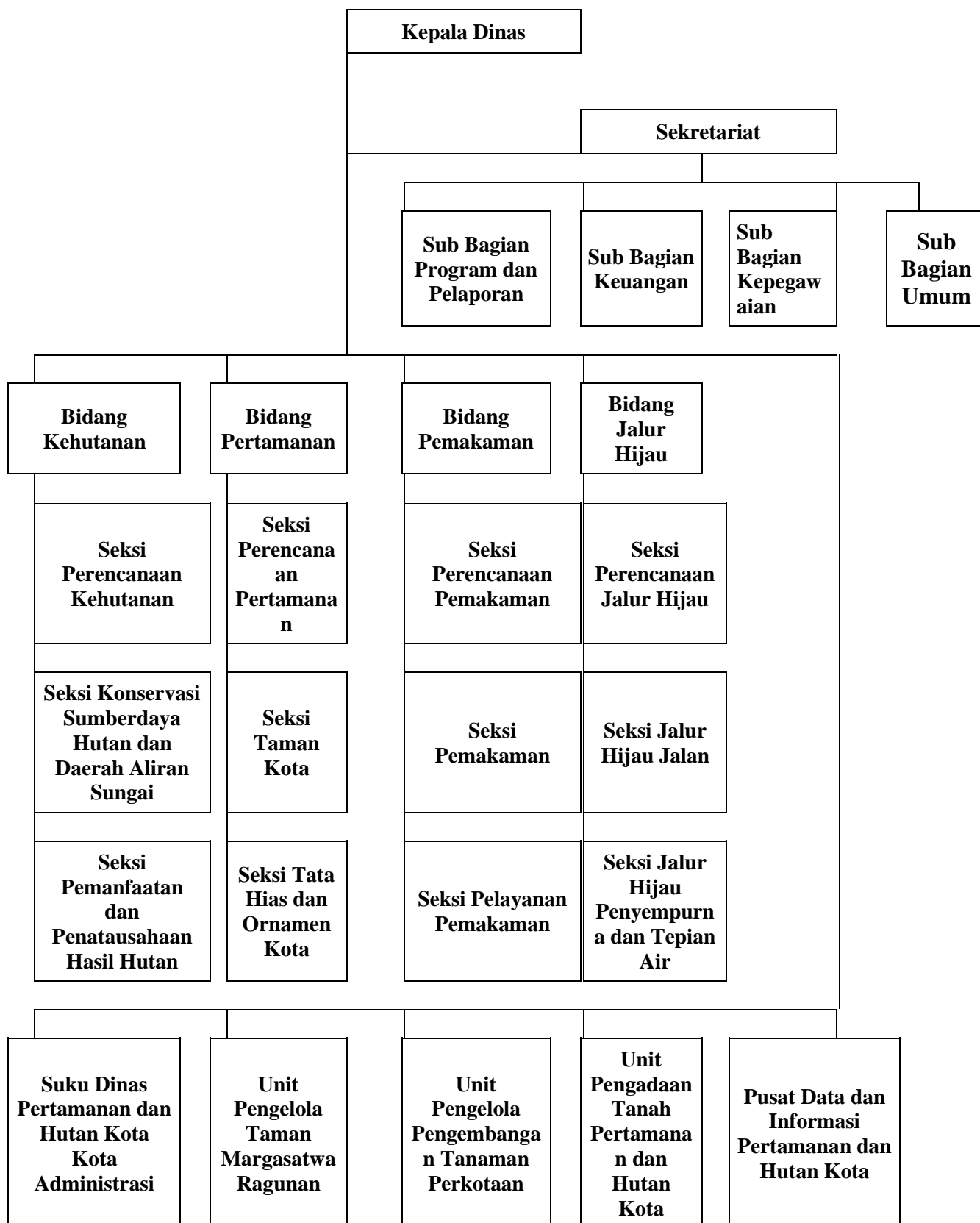
2. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - c. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - d. Pelaksanaan kebijakan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan jalur hijau;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan kehutanan;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan konservasi flora dan fauna;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman;
 - j. Pengembangan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau, dan pemakaman;
 - k. Pengawasan dan pengendalian izin/non izin di bidang kehutanan;
 - l. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - m. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanaman dan hutan kota;
 - n. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan

- kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman;
- o. Pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital pelaksanaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman pada permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman; dan
 - p. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

4.2.2 Kedudukan Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta

- a. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dipimpin oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
- b. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berada di bawah koordinasi asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah.
- d. Kepala Dinas melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman pada sub urusan Pertamanan dan Permakaman.

4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta



4.3 Dasar Hukum Pembentukan Kawasan Hutan Mangrove

1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 yg berwenang dalam pengelolaan hutan mangrove adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

- 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2079);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007)

4.4 Penyajian dan Analisis Data

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan dan menganalisis data yang telah diperoleh dari proses penelitian yang peneliti lakukan selama di lapangan dan sebelum peneliti terjun ke lapangan melalui literatur yang telah peneliti ketahui sebelumnya. Data yang diperoleh peneliti berasal dari studi pustaka dan studi lapangan yang berhubungan dan sesuai dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Data yang diperoleh peneliti di lapangan berasal dari wawancara dan dokumentasi terhadap informan-informan yang peneliti nilai sebagai informan yang mengetahui terkait permasalahan dalam penelitian ini. Adapun informan-informan tersebut diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4.5 Nama-nama Sumber Data Informan

No.	Informan	Jabatan
1.	Bapak Arie Fajar Septa S.Hut	Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta

Sumber: Peneliti (2023)

4.4.1 Strategi Pemerintah Dalam Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove Kapuk Muara Jakarta Utara

Dalam menjawab permasalahan ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian peneliti yang peneliti peroleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta beberapa literatur studi terkait strategi pemerintah dalam pelestarian ekowisata hutan mangrove Kapuk Muara Jakarta Utara.

Sebelumnya peneliti akan menjabarkan hasil penelitian sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah peneliti susun sebelumnya. Adapun indikator-indikator yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini peneliti menggunakan teori Hunger dan Wheelen (2003) yang berjudul manajemen strategis, Strategi merupakan menentukan strategi organisasi sebuah proses di mana para manajer membuat pilihan serangkaian strategi untuk organisasi yang akan memungkinkannya mencapai kinerja yang lebih baik. Diantaranya terdiri dari pengamatan lingkungan, perumusan strategi, dan implementasi strategi.

Indikator-indikator tersebut digunakan karena dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan diperlukan untuk memperhatikan beberapa faktor yang telah peneliti jabarkan sebagai indikator peneliti, agar dalam pengimplemtasiannya dapat berhasil dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil wawancara peneliti sajikan dan analisis sebagai berikut:

4.4.4.1 Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan mengacu pada proses pengumpulan, pengawasan, dan penyediaan informasi untuk tujuan strategi. Ini membantu dalam menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi organisasi. Setelah melaksanakan proses analisis lingkungan, manajemen harus mengevaluasinya secara terus menerus dan berusaha memperbaikinya. Sebelum melakukan strategi terlebih dahulu melakukan pengamatan lingkungan.

Dari segi Pengamatan Lingkungan , Bapak Arie Fajar Septa S.Hut selaku Kepala Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menjelaskan bahwa:

“Sumber Daya Manusia yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan kurang berkualitas dan berkompeten sesuai bidangnya, dalam pelaksanaan suatu kebijakan contohnya menangani setiap permasalahan yang terjadi di lapangan, hutan mangrove di kapuk muara memiliki kapasitas lumpur yang baik sehingga dapat membantu mempercepat pertumbuhan mangrove namun sayangnya saat ini beberapa hutan mangrove mengalami kerusakan baik oleh alam (abrasi) maupun manusia (illegal logging) tidak segera ditangani dengan baik”. (Wawancara tanggal 2 Maret 2023)

Hasil wawancara diatas memaparkan dari segi Pengamatan Lingkungan bahwa keberadaan hutan mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara memiliki kapasitas lumpur yang baik dan dapat membantu mempercepat pertumbuhan mangrove namun masih terdapat hutan mangrove yang rusak akibat dari faktor alam dan faktor manusia seperti perambahan hutan secara bebas.

a. Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara.

Faktor yang menghalangi ataupun menghambat yang dihadapi oleh instansi baik itu secara internal dan juga eksternal merupakan bentuk dari suatu kendala. Yang membatasi sistem baik instansi maupun organisasi dalam mencapai suatu tujuan dari instansi itu sendiri juga disebut dengan kendala. Dalam pelestarian hutan mangrove di Kapuk Muara Jakarta maka kendala yang dihadapi perlu ditangani agar pelestarian hutan mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Adapun faktor penghambat dalam pelestarian hutan mangrove yaitu:

- Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala yang terjadi dalam upaya pelestarian hutan mangrove yang dialami oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yaitu karena adanya faktor kekurangan sumber daya manusia (SDM) dimana kekurangan sumber daya manusia (SDM) tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelestarian hutan mangrove.

Hasil wawancara bersama bapak Arie Fajar Septa S.Hut selaku Kepala Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menjelaskan bahwa:

”Saat melakukan program kegiatan upaya pelestarian hutan mangrove yaitu kami mengalami kendala kekurangan personil atau kekurangan SDM dimana kendala tersebut sangat berpengaruh dalam proses kegiatan pelestarian hutan mangrove”. (Wawancara 2 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas memaparkan bahwa Kekurangan sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh besar bagi keberhasilan program kegiatan atau strategi dalam pelestarian hutan mangrove, karena dengan adanya kekurangan sumber daya manusia (SDM) maka kegiatan yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik karena sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan kegiatan pelestarian hutan mangrove.

4.4.4.2 Perumusan Strategi

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Arie Fajar Septa S.hut selaku Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta

menjelaskan:

“Untuk tercapainya suatu tujuan pengelolaan yang di inginkan untuk melestarikan suatu ekowisata hutan mangrove maka pemerintah menerapkan strategi-strategi demi meningkatkan pengelola ekowisata hutan mangrove ini, jadi pemerintah menerapkan strategi edukatif berupa memberi pelatihan kepada penanggung jawab lapangan serta masyarakat untuk membantu serta menjaga dan merawat tanaman mangrove.”
(Wawancara 2 Maret 2023)

Hasil dari wawancara diatas memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua strategi dalam mengelola ekowisata hutan mangrove Kapuk Muara untuk melestarikannya. berkaitan dengan teori Hunger dan Wheelen (2003) yang berjudul manajemen strategi, diantaranya sebagai berikut:

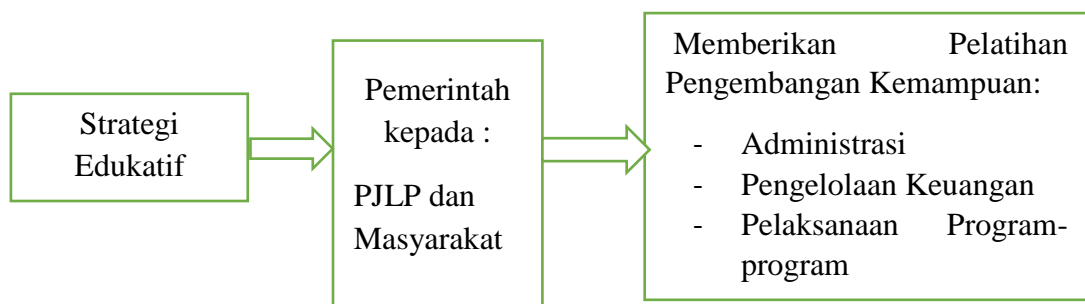
a) Strategi Edukatif

Strategi edukatif dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove di kecamatan pejaringan Jakarta Utara tidak terlepas dari faktor manusia yang bekerja dalam suatu lingkungan atau organisasi yang dapat disebut juga pegawai, Penanggung Jawab Lapangan (PJLP), Karyawan, Dan lain-lain. Juga merupakan asset yang sangat penting didalam suatu organisasi atau instansi dimana sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana dalam dalam suatu organisasi atau instituti tersebut. Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan, oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten sebagai pelaksana kebijakan, tanpa adanya sumber manusia maka implementasi suatu kebijakan tidak akan terlaksana secara efektif dan efisien. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan

pemerintah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas sebuah Strategi Edukatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sudah berusaha menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan namun dalam kenyataannya di lapangan, sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan dinilai kurang berkualitas dan berkompeten sesuai bidangnya. Hal tersebut terlihat dari kerja mereka yang kurang maksimal dalam menangani setiap permasalahan yang ada. Maka dari itu, pemerintah harus lebih serius dan tepat dalam menunjuk sumber daya manusia sebagai pelaksana.

Analisis kajian teori strategi Edukatif dari wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan strategi ini sangat penting dalam pengelola ekowisata dengan memberi pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan terhadap suatu aspek tertentu. Kegiatan pelatihan seperti pengembangan kemampuan dalam pengelolaan kelompok, contohnya yaitu Administrasi, pengelolaan keuangan, kepengurusan dan aturan pelaksanaan program.



Dari kerangka diatas tersebut, Bahwa penulis akan menganalisis Strategi Edukatif berbentuk tabel secara lebih detail, karena dari teori di atas sangat berkaitan dengan strategi-strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 4.6 Strategi Edukatif Pada Objek Ekowisata Mangrove Jakarta Utara

Karakteristik	Penanggung Jawab Lapangan	Keterangan Edukatif	Tujuan atau Manfaat	Hasil Analisis
Strategi Edukatif	1) Bpk. Johana Setiawan 2) Bpk. Ujang 3) Bpk. Santoso	4)Pelatihan Pengembangan Kemampuan dalam Pengelolaan Kelompok. Contohnya: - Administrasi - Pengelolaan Keuangan - Kepengurusan, dan - Pelaksanaan Program.	Strategi Edukasi Pelatihan pengembangan kemampuan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan kelompok sasaran terhadap suatu aspek tertentu.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta khususnya di bidang kehutanan merupakan pihak yang memiliki pengetahuan tentang kondisi Ekowisata Mangrove dan pihak pemerintah memiliki kepentingan dalam memberikan edukasi berupa pelatihan pengembangan kemampuan kepada Para PJLP (penanggung jawab Lapangan) beserta Pegawai

			<p>dan masyarakat. yang menjadi salah satu bagian dari pengelola ekowisata, Seperti merencanakan pelaksanaan suatu program-program agar lebih memahami bagaimana cara mengelola objek wisata dan tercapainya suatu tujuan yang optimal.</p>
--	--	--	---

Sumber: Hasil Analisis 2023

Berdasarkan data analisis di atas bahwa pentingnya Pemerintah memberikan edukasi kepada pengelolaan ekowisata mangrove. Hal ini dapat ditunjukkan pengelola ekowisata mangrove dianggap belum maksimal dalam memperhatikan daya dukung pengetahuan. Karena kerusakan mangrove tidak segera ditangani dengan baik oleh penanggung jawab sehingga kebijakan kurang berkualitas dan berkompeten. Maka dari itu, Pemerintah memberikan strategi edukasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola ekowisata demi menjaga serta melestarikan hutan mangrove .

a) Strategi Fasilitatif

Pembentukan kelembagaan dilakukan karena melalui lembaga-lembaga Ekowisata dapat membantu pelaksanaan kegiatan perlindungan

hutan dan kegiatan rehabilitasi hutan, oleh karena itu sudah sewajarnya pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat tersebut karena sangat banyak membantu tugas-tugas pemerintah daerah dalam hal perlindungan hutan mangrove. Selain sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan, juga harus didukung dengan penyediaan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, karena tanpa adanya Sarana dan Prasarana pendukung maka kebijakan tidak akan terlaksana secara baik.

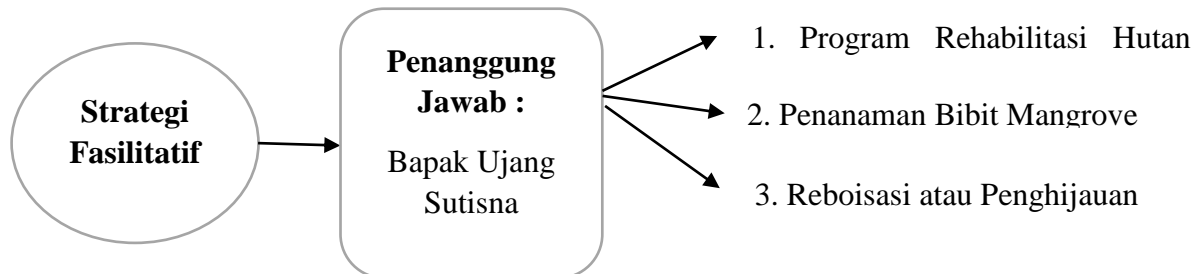
Menurut Bapak Ujang yang merupakan Penanggung Jawab Lapangan Bidang Kehutanan mengatakan bahwa:

”mengenai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para pelaksana kebijakan terlihat cukup baik itu berupa tempat maupun alat yang digunakan. Pemerintah memberikan fasilitas cukup untuk para pelaksana kebijakan sehingga mereka bias bekerja dengan baik, ini terlihat dari gedung yang mereka tempati sudah cukup baik. Hal ini mempengaruhi kerja mereka dalam menjalankan yang diperintahkan oleh atasannya” (Wawancara 2 Maret 2023)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyediakan anggaran kurang lebih sekitar 1 Milyar untuk pelaksanaan kebijakan seperti Reboisasi, Penghijauan, dan lain-lain. Maka oleh sebab itu sudah seharusnya para pelaksana kebijakan harus bisa bekerja.

Analisis kajian teori strategi fasilitatif dari wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan strategi fasilitatif dengan memberi bantuan fasilitas sarana dan prasarana sudah dilakukan akan tetapi pemberian bantuan usaha tidak tepat

sasaran dari anggaran pemerintah dengan yang dibutuhkan dilapangan.



Dari kerangka diatas tersebut, Bahwa penulis akan menganalisis Strategi Fasilitatif berbentuk Tabel secara lebih detail, karena dari teori di atas sangat berkaitan dengan strategi-strategi Pengelola pada objek yang ada:

Tabel 4.7 Strategi Fasilitatif pada Ekowisata Mangrove Jakarta Utara

Karakteristik	Penanggung Jawab	Program	Manfaat	Hasil Analisis
Strategi Fasilitatif	Bapak. Ujang Sutisna	1) Rehabilitasi Mangrove. 2) Penanaman Bibit Mangrove 3) Reboisasi atau Penghijauan	Dapat mengurangi tingkat abrasi, menahan tiupan angin, menambah sumber pendapatan, menjadi objek wisata, sehingga bisa diterapkan untuk mengelola ekowisata hutan mangrove yang baik agar tercapainya tujuan pelestarian.	Terlihat pada kondisi kawasan ekowisata mangrove saat ini yang sangat memprihatinkan, maka penulis menganalisis menggunakan teori strategi yaitu diantaranya ada strategi fasilitatif, strategi fasilitatif ini banyak program diantaranya seperti melakukan

				<p>Rehabilitasi, Penanaman Bibit, dan reboisasi atau penghijauan. Yang bertujuan untuk mengurangi tingkat abrasi, dan menahan tiupan angin yang menyebabkan tumbangnya pohon terlebih lagi pada saat musim angin utara resiko dari kerusakan menjadi berkali-kali lipat. melakukan upaya pemulihan kerusakan mangrove seperti contohnya mengganti mangrove yang rusak dengan bibit baru.</p>
--	--	--	--	--

Sumber: Hasil Analisis 2023

Berdasarkan data analisis bahwa Pengelolaan ekowisata belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung fasilitas lingkungan. Hal ini dapat ditunjukkan pengelola ekowisata dianggap belum maksimal untuk memperhatikan kerapatan mangrove, kerusakan mangrove serta luasan mangrove. Selain itu upaya pencegahan juga dilakukan dengan membersihkan mangrove dari sampah bawaan. Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan dengan membatasi jumlah bibit yang ditanam.

Adapun beberapa fasilitas-fasilitas di dalam objek ini yaitu diantaranya tempat beribadah seperti Musholah, Pandopo tempat untuk beristirahat dan ada beberapa infrastruktur yaitu tempat sampah, dan juga jembatan susur hutan untuk berkeliling menikmati pemandangan banyaknya macam-macam tumbuhan yang ada dan terjangkaunya lokasi toilet di objek ini sehingga sangat membantu pengunjung dalam menggunakan toilet secara gratis jika dibutuhkan. Toilet di Kawasan Ekowisata Mangrove berada di dekat gerbang masuk objek sehingga memudahkan pengunjung dalam mengingat lokasi toilet tersebut. Namun, sangat disayangkan toilet di objek ini hanya tersedia 1 bilik saja dengan beberapa saluran air untuk membilas di luar toilet. Akan tetapi, di Kawasan Ekowisata Mangrove ini tidak ada fasilitas penginapan yang disediakan. Sehingga untuk fasilitas penginapan di objek wisata ini hanya ada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk atau di hotel-hotel sekitar objek ini.

Pihak pengelola ekowisata menyediakan fasilitas berupa tulisan atau papan pengetahuan berupa yang memberikan informasi tentang jenis mangrove dan satwa yang hidup didalamnya yang mengantar wisatawan menelusuri ekowisata dan memberikan informasi terkait mangrove. Selain itu, fasilitas pengetahuan dan pendidikan i juga diberikan melali tour guide. Berikut adalah contoh fasilitas yang diberikan:



Gambar Contoh Fasilitas Edukasi

Sumber : Hasil Observasi, 2023

Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci terkait fasilitas yang di sediakan di kawasan EkOwisata Mangrove Jakarta Utara :

Tabel 4.8 Fasilitas Ekowisata Mangrove Kapuk Muara

No.	Fasilitas Objek	Penanggung Jawab Lapangan	Hasil Analisis
1.	Fasilitas Pengetahuan/Edukasi (Tulisan atau Papan Informasi)	Bapak Santoso	<p>Pihak pengelola menyediakan fasilitas edukasi berupa tulisan atau papan yang memberikan informasi tentang jenis-jenis tanaman mangrove dan satwa yang hidup didalamnya.</p> <p>Bertujuan untuk mengetahui prihal tanaman mangrove serta mengetahui apa saja manfaat-manfaat yang ada.</p>
2.	Fasilitas Infrastruktur atau Sarana Persarana. (Tempat Sampah, Toilet, Mushola. Pandopo)		<p>Selain beberapa fasilitas, pihak pengelola ekowisata mangrove muara angke juga menyediakan tempat sampah pada beberapa sudut titik.</p> <p>Yang bertujuan untuk tetap menjaga kebersihan objek dan agar tumbuhan-tumbuhan mangrove tetap terawat tidak tercemar oleh sampah-sampah.</p> <p>Begitupun terjangkaunya lokasi toilet dan mushola di objek ini sehingga sangat membantu pengunjung dalam menggunakan secara gratis tanpa harus membayarnya. dan fasilitas</p>

			terakhir yaitu Pandopo, yang mana fasilitas tersebut bertujuan untuk tempat para pengunjung berteduh dan beristirahat.
--	--	--	--

Sumber: Hasil Analisis 2023

Berdasarkan data analisis diatas bahwa fasilitas ekowisata ini sudah cukup lengkap, namun ada beberapa pula yang masih kurang memadai seperti pandopo yang dikit dan kursi di sepanjang titik sudut ekowisata ini, sehingga membuat para pengunjung lelah dan tidak bisa berhenti sejenak di sepanjang jalan karena masih kurangnya fasilitas kursi yang ada. Maka dari itu hal ini perlu adanya koordinasi antara pihak Penanggung Jawab Lapangan (PJLP) kepada pihak pengelola agar fasilitas-fasilitas umum yang ada di dalam kawasan ekowisata mangrove ini lebih diperbanyak.

4.4.4.3 Implementasi Strategi

Dalam Pengelolaan ekowisata hutan mangrove ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan implementasi strategi untuk mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan anggaran pada objek tersebut

a. Anggaran Ekowisata Mangrove Kapuk Muara

Anggaran dalam hal ini adalah anggaran dana yang di gunakan untuk pengelolaan ekowisata baik dalam bentuk anggaran perawatan maupun anggaran pemeliharaan. Bahwasannya Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota telah memiliki anggaran pada setiap tahunnya.

Tabel 4.9 Karakteristik Anggaran Pengelolaan Ekowisata

No	Karakteristik	Keterangan	Hasil Analisis
1.	Anggaran dana berasal dari pihak pengelola.	1) Perawatan Tanaman dan Lingkungan Ekowisata Mangrove. 2) Rehabilitasi Mangrove 3) Penanaman Bibit Ulang 4) Perawatan Pemancingan 5) Renovasi infrastruktur Jembatan dalam objek ekowisata	Anggaran dana untuk pengelolaan berasal dari pengelola kurang lebih sebesar 1 Milyar. Mengingat bahwa pengelolaan ekowisata di bagi menjadi 2 ada Pemeliharaan dan juga Perawatan. Pengelolaan perawatan mangrove berasal dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota umumnya pada Bidang Kehutanan. Dana ini masuk kedalam RAB Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk gaji pegawai, anggaran berasal dari uang ticketing seharga 6 (enam) Ribu Rupiah/Orang. Sementara dana untuk Rehabilitasi Mangrove, Penanaman Bibit, dan Renovasi Jembatan ekowisata, menggunakan dana anggaran 1 Milyar tersebut. Sedangkan untuk modal pembuatan pembuatan tempat pemancingan, anggaran berasal dari Pemerintah

			Provinsi senilai 60 Juta pada tahun 2019.
2.	Adanya dana kontribusi yang masuk ke Pemerintah	Tidak Ada	Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa tidak adanya dana kontribusi yang masuk ke Pemerintah Provinsi Hal ini dikarenakan anggaran yang berasal dari ticketing hanya hanya cukup digunakan untuk biaya perawatan dan gaji Pegawai/PJLP (Penanggung Jawab Lapangan).
3.	Di luar ekowisata	Santunan	Memberikan santunan untuk panti jompo yang di selenggarakan setiap dua bulan sekali.
4.	Transparansi anggaran sudah jelas		Transparansi anggaran untuk pengelola sudah jelas. Anggaran untuk mangrove sudah masuk kedalam RAB (Rancangan Anggaran Belanja) Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk Pengelolaan Pemancingan dan lain-lain sudah ada laporan kas sebagai bentuk pertanggung jawaban anggaran.

Sumber: Hasil Analisis 2023

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa anggaran untuk pengelolaan ekowisata dari Pemerintah berasal dari hasil penjualan ticketing dan tidak adanya dana kontribusi yang masuk ke pemerintah. Hal ini perlu adanya koordiansi yang baik antara pemerintah dan pengelola sehingga anggaran yang dikeluarkan dan diperoleh dapat lebih terstruktur dan sesuai dengan tujuan pengelolaan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan ekowisata mangrove di kapuk muara. Pengembangan sarana prasarana obyek wisata mangrove kapuk muara selama ini masih terkendala dengan kurangnya anggaran yang dimiliki, sebab pengeluaran dana anggaran pada setiap tahunnya masih mengalami kenaikan dan penurunan. Diberlakukannya Perda Nomor 6 Tahun 2017 menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pengembangan obyek ekowisata mangrove kapuk muara jakarta utara yang nantinya akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya ketersediaan anggaran yang cukup maka pengelolaan ekowisata mangrove kapuk muara akan menjadi lebih optimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil analisis penelitian Strategi Dinas Pertamanan Dan Kehutanan dalam pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara pengelolaan yang dilakukan di kawasan ekowisata mangrove kapuk muara belum memenuhi prinsip ekowisata khususnya prinsip konservasi lingkungan. Sedangkan ditinjau dari partisipasi masyarakat, pengelolaan ekowisata sama sekali tidak melibatkan masyarakat, namun hanya melibatkan orang-orang tertentu saja yaitu seperti petugas penanggung jawab lapangan ekowisata mangrove tersendiri. Selain itu, aktivitas edukasi yang ditawarkan juga masih kurang bervariasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aktivitas pemancingan ekowisata yang tidak mengedukasi pengunjung. Sedangkan ditinjau dari aspek ekonomi, pengelola ekowisata sudah cukup memberikan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan ekonomi.

Strategi pengelolaan yang harus dilakukan antara lain rehabilitasi kawasan konservasi dengan cara meningkatkan kualitas ekosistem mangrove dan sumber daya alam yang ada untuk mewujudkan pengelolaan ekowisata terpadu dan bersinergi sehingga pengelolaan hanya memiliki satu tujuan besar dan dilindungi oleh badan hukum yang jelas. Adanya penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan peninjauan kembali peraturan yang ada serta menerapkan kebijakan insentif

dan disinsentif bagi institusi/perorangan yang ikut andil dalam kegiatan pengelolaan ekowisata

memiliki daya tarik terutama pemandangannya yang indah dan natural yang dapat menjadi potensi terbesar di dalam objek wisata alam tersebut, fasilitas wisata yang memadai terutama pandopo tempat untuk beristirahat sejenak para pengunjung , serta aksesibilitasnya yang cukup terjangkau. Oleh sebab itu, jumlah pengunjung objek tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya.

5.2 Saran

- 1) Pengelola dan Penjaga Kawasan Ekowisata Mangrove sebaiknya ada petugas yang berkeliling objek tersebut untuk mengawasi keberadaan fauna yang sesekali dapat mengganggu pengunjung, membuka kembali penjualan cinderamata khas mangrove di objek wisata tersebut, serta lebih memperhatikan kebersihan dalam objek ini. Mempertahankan dan meningkatkan pemandangan indah di kawasan ekowisata mangrove tersebut dan kegiatan penanaman untuk menambah rerimbunan tumbuhan serta suhu udara yang baik.
- 2) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan ekowisata mangrove kapuk muara.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa meneliti objek yang berbeda dan lebih detail terkait zonasi kawasan dan strategi pengelolaan dapat sesuai dengan zonasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hani Hasan. 2017. 'Penerapan Economic Order Quantity (EOQ) Pada PT Perkebunan Nusantara VIII'. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 6(2): 86–98.
- Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, M. Fuad Fahrudin. 2022. 'Analisis Perilaku Keruangan Wisatawan Mangrove di Taman Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk'. 2(8.5.2017): 2003–5.
- Afrizal, 2016. 2020. 'Pelestarian Hutan Mangrove'. *Afrizal*, 2016 5(3): 248–53.
- Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, M. Fuad Fahrudin. 2022. 'Analisis Perilaku Keruangan Wisatawan Mangrove di Taman Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk'. 2(8.5.2017): 2003–5.
- Admin, Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2015. 'Pengertian Ekowisata'. *10 Februari*: 1.
- Apelabi, Gabriel Otan. 2019. 'persepsi masyarakat terhadap pelestarian hutan mangrove dengan pendekatan nep (new environmental paradigm) Wilayah pesisir umumnya memiliki kompleksitas yang tinggi baik secara ekonomi maupun secara ekologi (Begen , 2004). Berbagai ragam aktivitas mas'. *10(2)*: 282–98.
- Ariana, Riska. 2016. 'Pengelolaan Hutan Mangrove,Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove'. (2): 1–23.
- Brier, Jennifer, a/ac lia dwi jayanti. 2020. 'strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan mangrove di kecamatan bontoharu kabupaten kepulauan layar'. 21(1): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Ely, Achmad J, Lolita Tuhumena, Juanita Sopaheluwakan, a/ac Yvonne Pattinaja. 2021. 'Strategi Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Di Negeri Amahai'. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan* 17(1): 57–67.

- Hamdani. 2020. 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran'. *Skripsi Universitas Islam Negeri*.
- Humaniora. 2022. 'Peringati Hari Lingkungan Dunia, BRI Insurance Tanam 2000 Bibit Mangrove'. *rabu, 08 juni*.
- Iii, B A B. 2020. 'Bab iii metode penyusunan laporan 3.1'. (April): 39–43.
- Ikhsan, Wahyudi, Wisnu Ardytia, a/ac Irwan Kurniawan Soetijono. 2021. 'Implementasi Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Konservasi Sumber Mata Air di Gombongsari Kalipuro Banyuwangi'. *Populika* 9(2): 86–93.
- Indriawati, Prita, a/ac Retnowaty Retnowaty. 2018. 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Ekosistem Pesisir Dan Hutan Mangrove Manggar'. *Jurnal Bagimu Negeri* 2(1): 29–38.
- Irwinsyah, Fachrul. 2019. 'Usaha Kurangi Kerusakan Hutan Bakau'. *15 agustus*.
- Made Yoga Putra, Nigraha & Hwihanus. 2015. 'Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Muara Sungai Bajulma_tti, desa gajahrejo, kecamatan gedangan, kabupaten malang jawa timur'. 13(3): 1576–80.
- Martini, Rini. 2020. 'Pembangunan Lestarian 213 hektare Hutan Bakau Munjang'. *02 agustus*.
- Perikanan, kementerian kelautan. 2021. 'Kondisi Mangrove di Indonesia'. : 1.
- Prasetyo, Andhika. 2021. 'Hutan Mangrove sudah Rusak'. *28 September*: 1.
- Rahmawaty. 2006. 'Upaya Pelestarian Mangrove Berdasarkan Pendekatan Masyarakat'. *Departemen Kehutanan, Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan (Upaya Pelestarian Mangrove)*: 19.
- Sastrayuda, Gumelar S. 2010. 'Hand Out Mata Kuliah Concept Resort and Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort And Leisure'. *Hand out resort and leisure*: 1–27.

- Sompah, Sudarmono. 2015. 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam pelestarian Kawasan Hutan Mangrove di Kabupaten Pohuwato'. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 4. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/125/68>.
- Syahroni, Arman. 2020. 'Merupakan artikel yang merupakan kegiatan dari tugas mata kuliah fisiologi tingkah laku larva TA 2019/2020 ganjil prodi budidaya perairan fakultas ilmu kelautan dan perikanan universitas maritim raja ali haji' : 1-9.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Andyni Rahmawati
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 14 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jl.Kh. Kilin No.16 Rt.05/Rw.06, Kel Batu Jaya
Timur, Kec. Batu
Ceper, Kota Tangerang, Banten
Nomor Handphone : 089619656352
Email : Andynirahmawati12@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Al-Khadiyah : 2006
SDN Bubulak 3 Batu Ceper : 2007-2013
MTS Negeri Benda Tangerang : 2013-2016
MA Darur Rosyid Jakarta Barat : 2016-2019

PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN	INDIKATOR	PERTANYAAN
<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Jakarta. • Kepala Seksi perencanaan kehutanan 	<p>Kehutanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sejarah didirikannya ekowisata dan kondisi Ekowisata Hutan Mangrove saat ini? 2. Apa saja faktor-faktor penyebab kerusakan hutan mangrove? 3. Strategi apa yang digunakan untuk melestarikan ekowisata dan bagaimana cara mengelolanya? 4. Apakah Pemerintah Ekowisata Hutan Mangrove mempunyai rancangan anggaran biaya? Dan Apakah Pengeluaran untuk ekowisata tahun lalu melebihi anggaran biaya ekowisata hutan mangrove? 5. Apa saja program-program pemerintah yang dilakukan terhadap

		<p>ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara?</p> <p>6. Apakah ekowisata tersebut murni milik pemerintah atau melibatkan masyarakat setempat?</p> <p>7. Apa saja dampak positif tanaman mangrove itu?</p> <p>8. Di kelola oleh siapakah Ekowisata Hutan Mangrove Kapuk Muara ini?</p> <p>9. Fasilitas apa yang diberikan pemerintah dalam mendukung pengembangan ekowisata mangrove?</p> <p>10. Program apa sajakah yang di berikan pemerintah untuk melestarikan ekowisata Mangrove ini?</p>
--	--	---

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1

Nama : Bapak Arie Fajar Septa, S.Hut

Jabatan : Kepala Bidang Kehutanan

Hari/Tanggal : Jum'at, 24 Maret 2023

Hasil Wawancara :

1. Bagaimana sejarah didirikannya ekowisata dan kondisi Ekowisata Hutan Mangrove saat ini?

Jawab: Kondisi Ekowisata Hutan Mangrove saat ini banyak sekali penanaman, sebenarnya sarana persarana itu hanya untuk pengelolaannya saja yaitu tenaga pemeliharaan, tenaga keamanan. Seiring warktu berjalan banyak pengunjung yang ikut untuk melihat mangrove juga, apalagi pemancing, akhirnya kita berpikir untuk menjadikan ini objek wisata, kemudian dulu awalnya belum di tumbuhi mangrove. Pada tahun 2007 Dinas Kehutanan banyak melakukan penanaman. Dan kondisi ekowisata mangrove kondisi saat ini sudah jauh lebih baik dari pada tahun lalu.

2. Apa saja faktor-faktor penyebab kerusakan hutan mangrove?

Jawab: Faktor kerusakanya yaitu adanya pencemaran, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup serta tidak sesuainya faktor alam dengan kondisi fisik yang dibutuhkan hutan mangrove, Maka dari itu disarankan agar dilakukan

penyuluhan dan dilakukan rehabilitasi terhadap hutan mangrove yang mengalami kerusakan.

3. Strategi apakah yang digunakan untuk melestarikan ekowisata dan bagaimana cara mengelolanya?

Jawab: Strategi yang di gunakannya yaitu mengadakan penanaman bibit ulang, melakukan rehabilitasi hutan mangrove, memperhatikan kesehatan bibit.

4. Apakah pemerintah ekowisata hutan mangrove mempunyai rancangan anggaran biaya? Dan apakah Pengeluaran untuk ekowisata tahun lalu melebihi anggaran biaya ekowisata hutan mangrove?

Jawab: Anggaran setiap tahun ke tahunnya itu sudah jelas sangat berbeda, biaya anggaran kurang lebih 1 milyar untuk melestarikan ekowisata mangrove tersebut.

5. Apakah program-program pemerintah yang dilakukan terhadap ekowisata hutan mangrove di kapuk muara?

Jawab: pada tahun 2021 Pemprov DKI melakukan program penanaman sebanyak 2.500 bibit mangrove, program menanam pohon berlangsung setiap jumat pagi di lokasi yang berbeda. Penanaman pohon bakau itu juga merupakan bagian dari program jumat menanam yang di rencanakan sejak oktober 2021.

6. Apakah ekowisata tersebut murni milik pemerintah atau melibatkan masyarakat setempat?

Jawab: Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Kapuk muara itu murni milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanpa ikut campur tangan masyarakat.

7. Apa saja dampak positif tanaman mangrove itu?

Jawab: Banyak sekali Dampak Positifnya yaitu bagi Ekonomi, penghasil kebutuhan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Sedangkan dampak ekologinya sebagai pelindung Garis pantai, dan mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dll.

8. Di kelola oleh siapakah Ekowisata Hutan Mangrove Kapuk Muara ini?

Jawab: Ekowisata ini di kelola oleh Pemprov DKI Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Bidang Kehutanan, kebetulan sebelumnya ekowisata ini di kelola oleh Dinas Kelautan dan Pertanian, juga di kelola oleh Dinas Kehutanan, Tapi Sekarang ini di alihkan ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mengelola pada saat ini.


9. Fasilitas apa yang diberikan oleh pemerintah dalam mendukung pengembangan ekowisata mangrove?

Jawab: Fasilitas yang di beri oleh pemerintah ya seperti toilet umum gratis, pandopo untuk tempat beristirahat pengunjung, juga ada mushola di dalam wisata ini untuk beribadah, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

10. Program apa sajakah yang di berikan Pemerintah untuk melestarikan Ekowisata Mangrove ini?

Jawab: Banyak Program-program yg sudah terlaksanakan yaitu rehabilitas mangrove, penanaman bibit ulang, dan memperhatikan bibit-bibit.

LAMPIRAN SURAT-SURAT

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN - PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
BERDASARKAN SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 109/D/0/2009
Jl. Perintis Kemerdekaan I/33 Cikokol - Kota Tangerang Telp. 021 - 55733252 Fax. 021 - 55733252

Tangerang, 24 Rajab 1444H
15 Februari 2023

Nomor : 079/KET/III.3.AU/FISIP/2023
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
Jl. K.S. Tubun No.1 RT.2/RW.5, Petamburan, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
10260
Di
Tempat


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Ba'da salam kami sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
Berikut ini kami sampaikan, bahwa mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama	: Andyni Rahmawati
NPM	: 19-65-201-070
Prodi / Semester	: Ilmu Pemerintahan / VIII
No. HP	: 0896-1965-6352

Bermaksud melakukan penelitian dan wawancara, ke Dinas yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun surat pengantar ini diajukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir berupa skripsi dengan judul "Strategi Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara"

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.
Nasrun Minallah Wa Fathun Qorieb
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Achmad Kosasih, MM
NBM. 739.574

Tembusan:
1. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN - PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
BERDASARKAN SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 109/D/0/2009

Jl. Perintis Kemerdekaan I/33 Cikokol - Kota Tangerang Telp. 021 - 55733252 Fax. 021 - 55733252

Tangerang, 24 Rajab 1444H
15 Februari 2023

Nomor : 082/KET/III.3.AU/FISIP/2023
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Pegawai Bidang Kehutanan Ekowisata Hutan Mangrove Kapuk Muara Jakarta Utara
Jl. Katamaran Indah 1 RT.1/RW 7, Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
14460
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Ba'da salam kami sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Berikut ini kami sampaikan, bahwa mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama : Andyni Rahmawati
NPM : 19-65-201-070
Prodi / Semester : Ilmu Pemerintahan / VIII
No. HP : 0896-1965-6352

Bermaksud melakukan penelitian dan wawancara, ke Kantor yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun surat pengantar ini diajukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir berupa skripsi dengan judul "Strategi Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara"

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Nasrun Minallah Wa Fathun Qorieb
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Achmad Kosasih, MM
NBM. 739.574

Tembusan:
1. Arsip



LEMBAR PENGANTAR

Indek : _____ No. Srt/Kode : 079/KET/III.3.AU/FISIP/2023

Dari : Universitas Muhammadiyah Tangerang (Fakultas Ilmu Sosial)

Kepada : Kepala Bidang Kelutanan Distamhut Kota

Perihal / Isi ringkas : izin Penelitian

Tgl. Masuk : 02/03/23	Tgl. Srt : 15/02/23	Lampiran : -
Pengolah	Diteruskan	Disimpan

Penerima : Putri L

Pengirim :



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

JL. AIPDA KS TUBUN NO. 1 TELP. 5328454, 5480137 FAX. 53650412
JAKARTA 10260

Kepada
Yth. Dehan FISIP Universitas
Muhammadiyah Tangerang
di
Tangerang



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 1 Telepon 5328454, 5480137 Faksimile 53650412
Website <https://distamhut.jakarta.go.id> / E-mail distama@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos 10260

9 Maret 2023

Nomor : 731.kh.07.01
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian izin penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jln. Perintis Kemerdekaan I/33 Cikokol - Kota Tangerang

di
Tangerang

Sehubungan surat nomor: 079/KET/III.3.AU/FISIP/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal: Izin penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir berupa skripsi, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta memberi izin kepada mahasiswa:

Nama : Andyni Rahmawati
NPM : 1965201070
Program Studi : Ilmu Pemerintahan / VIII
Judul Tesis : Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Dalam Pengelolaan dan Pedestrian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara.

untuk melakukan penelitian dan wawancara sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan melalui email, telepon atau media lainnya dan selanjutnya dapat berkoordinasi dengan Sekretariat c.q. Subbagian Kepegawaian dan Bidang Kehutanan.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta



Dr. Bayu Meghantara, S.IP., M.Si.
NIP. 197205201991011001

Tembusan :

1. Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
2. Kepala Bidang Kehutanan
3. Arsip.

DOKUMENTASI PENELITIAN





INFRASTRUKTUR EKOWISATA MANGROVE KAPUK MUARA

